



**KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH DAN TRANSFER KE DAERAH

Wakil Menteri Keuangan

Disampaikan Pada:

Musrenbang Penyusunan RAPBD TAHUN 2017 PROVINSI DIY



7 MARET 2016



OUTLINE



ARAH KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH KE DEPAN



KONDISI PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI
PROVINSI D.I. YOGYAKARTA



ARAH KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH KE DEPAN



Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah



- **Perubahan Struktur dan Cakupan Transfer ke Daerah dan Dana Desa**
- **Peningkatan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa**
- **Reformulasi Kebijakan Transfer ke Daerah:**
 - a. **Dana Transfer Umum (DTU)**
 - b. **Dana Transfer Khusus (DTK)**
 - c. **Dana Insentif Daerah (DID)**
- **Kebijakan Dana Desa**



PERUBAHAN POSTUR TRANSFER KE DAERAH & DANA DESA



2015	2016
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
I. TRANSFER KE DAERAH	I. TRANSFER KE DAERAH
A. Dana perimbangan	A. Dana perimbangan
1. Dana Bagi Hasil	1. <i>Dana Transfer Umum (General Purpose Grant)</i>
2. Dana Alokasi Umum	a. Dana Bagi Hasil
3. Dana Alokasi Khusus	b. Dana Alokasi Umum
B. Dana Otonomi Khusus	2. <i>Dana Transfer Khusus (Specific Purpose Grant)</i>
C. Dana Keistimewaan Yogyakarta	a. Dana Alokasi Khusus Fisik
D. Dana Transfer Lainnya	b. Dana Alokasi Khusus Nonfisik
	B. Dana Insentif Daerah
	C. Dana Otsus dan Dana Keistimewaan DIY
II. DANA DESA	II. DANA DESA



Postur Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2015 dan TA 2016



POSTUR 2015	APBN 2015	APBNP 2015	POSTUR 2016	RAPBN 2016	APBN 2016	SELISIH
Transfer ke Daerah	637,9	643,8	Transfer ke Daerah	735,2	723,2	(12,0)
I. Dana Perimbangan	516,4	521,7	I. Dana Perimbangan	710,7	700,4	(10,3)
A. Dana Bagi Hasil			A. Dana Transfer Umum	495,5	491,5	(4,0)
1. Pajak	127,6	110,0	1. Dana Bagi Hasil	107,2	106,1	(1,1)
2. Sumber Daya Alam	50,5	54,2	a. Pajak	51,7	51,5	(0,205)
B. Dana Alokasi Umum	77,1	55,8	b. Sumber Daya Alam	55,5	54,6	(0,915)
C. Dana Alokasi Khusus	352,8	352,8	2. Dana Alokasi Umum	388,2	385,4	(2,8)
II. Dana Transfer Lainnya	104,4	104,4	B. Dana Transfer Khusus	215,2	208,9	(6,3)
III. Dana Otonomi Khusus	16,6	17,1	a. DAK Fisik	91,7	85,4	(6,3)
IV. Dana Keistimewaan DIY	0,547	0,547	b. DAK Non Fisik	123,4	123,5	-
Dana Desa	9,0	20,7	II. Dana Insentif Daerah	5,0	5,0	-
JUMLAH	647,0	664,6	III. Dana Otsus dan Dana Keistimewaan DIY	19,4	17,7	(1,6)
			A. Dana Otonomi Khusus	18,9	17,2	(1,6)
			B. Dana Keistimewaan DIY	0,547	0,547	-
			Dana Desa	46,9	46,9	-
			JUMLAH	782,2	770,1	(12,0)

(dalam triliun rupiah)



Dasar Kebijakan Peningkatan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa



1. Perlunya memperkuat ciri Indonesia sebagai negara Desentralisasi Fiskal.
2. Adanya kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan telah diserahkan dari Pusat ke Daerah (sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).
3. Perlunya peningkatan alokasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk mendukung implementasi Nawacita, yaitu cita:
 - Ketiga: membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI;
 - Kelima: meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
 - Keenam: meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
 - Ketujuh: kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor domestik.
4. Adanya UU Desa yang telah memberikan kewenangan dan sumber keuangan kepada desa antara lain berupa Dana Desa dari APBN.



REFORMULASI KEBIJAKAN DTU: DANA ALOKASI UMUM



Jangka Pendek

- Perbaiki Formula khususnya perhitungan Kebutuhan Fiskal dan Kapasitas Fiskal sesuai dengan variabel yang sudah ditentukan di UU Nomor 33 Tahun 2004.
- Perbaiki transparansi perhitungan DAU dengan mempertimbangkan bobot variabel dalam jangka menengah (tidak berubah tiap tahun).
- Masa transisi penerapan revisi UU 33/2004 (dengan menghilangkan AD) → bobot atau peranan AD secara bertahap terus dikurangi sehingga jika perubahan UU 33/2004 disepakati untuk menghilangkan AD maka formula baru akan lebih mudah dirancang tanpa AD.

Jangka Menengah

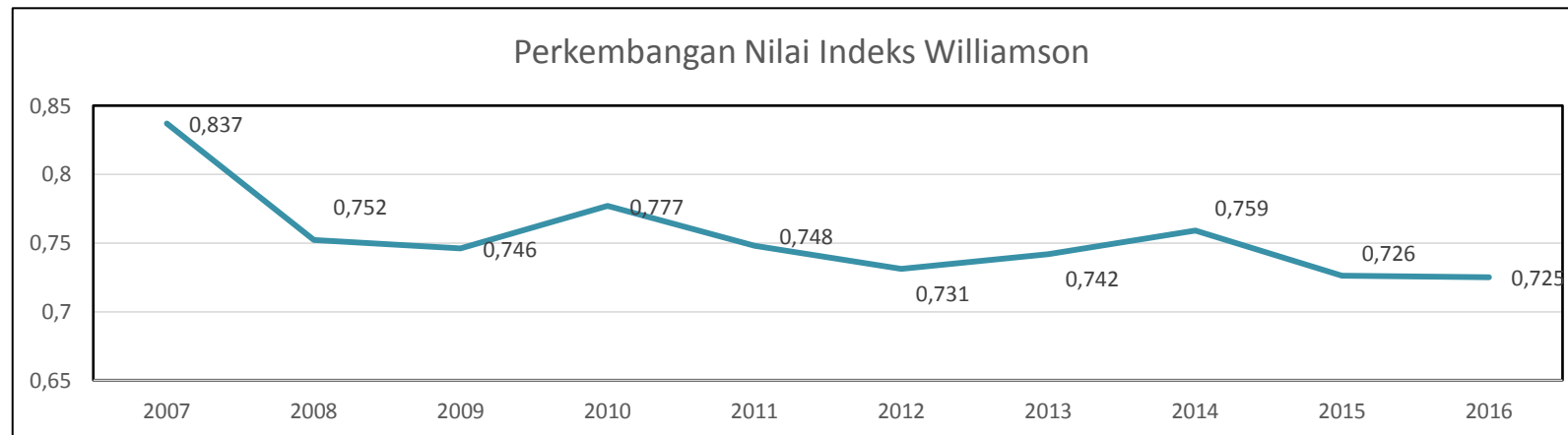
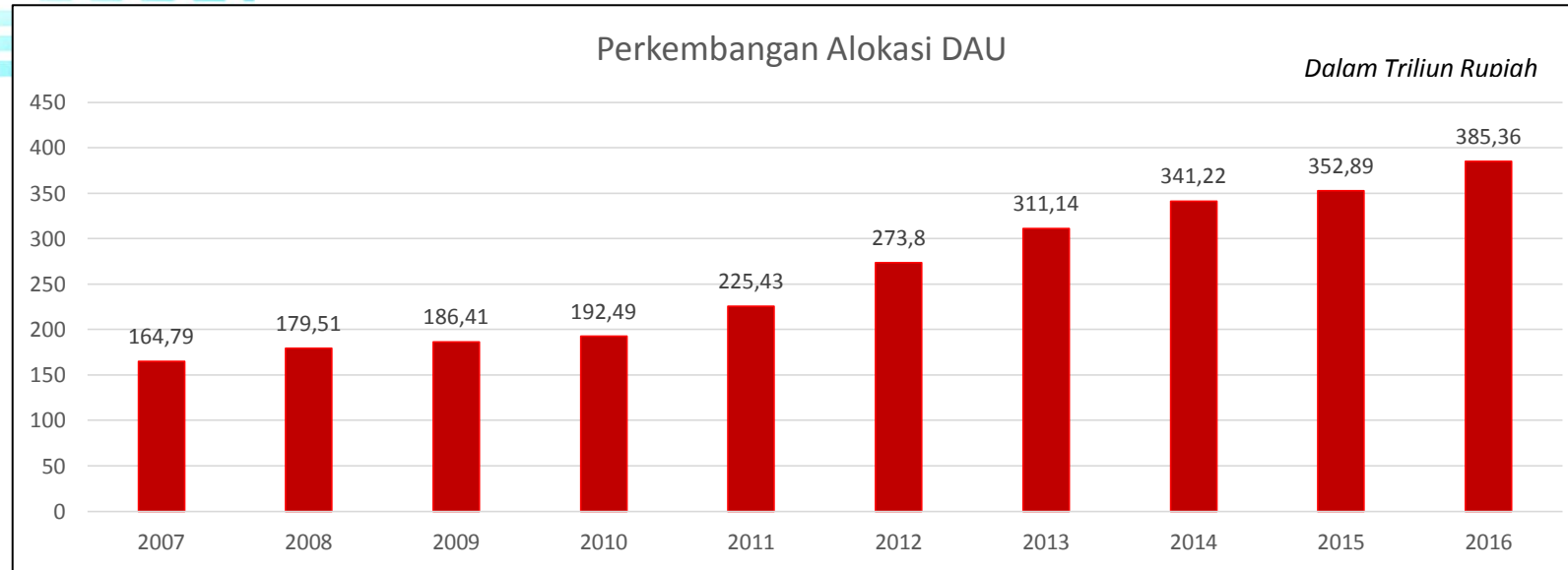
Revisi UU 33/2004 dinyatakan bahwa formulasi DAU diubah dengan menghilangkan AD dan menerapkan konsep Celah Fiskal.

Jangka Panjang

- Formula DAU berdasarkan cluster, misalnya berdasarkan kepadatan penduduk untuk Kab./Kota atau luas wilayah untuk Kabupaten dan jumlah penduduk untuk Kota.
- Kebutuhan daerah diukur dari kebutuhan riil daerah yang dikaitkan dengan kinerjanya dari estimasi menurut fungsi dan cakupan pelayanan.
- Pengukuran Kapasitas Fiskal menggunakan variabel potensi berdasarkan rasio agregat (PAD + DBH Pajak) dan DBH SDA dengan basis terkait (*average effective taxes/revenue rate*)



PERKEMBANGAN DAU DAN INDEKS WILLIAMSON





REFORMULASI KEBIJAKAN DTU: DANA BAGI HASIL



1. Memperbaiki cakupan DBH melalui:
 - a. menghapus DBH PBB P2 karena telah menjadi pajak daerah dan DBH SDA Perikanan karena akan dijadikan sebagai pungutan daerah (retribusi daerah).
 - b. Menambah cakupan DBH PBB termasuk PBB sektor lainnya diluar sektor pertambangan, perkebunan, dan perhutanan.
2. Memperbaiki porsi pembagian DBH kepada daerah penghasil berdasarkan prinsip by origin.
3. Memperbaiki pola penyaluran DBH untuk memberi kepastian bagi penerimaan kas daerah.



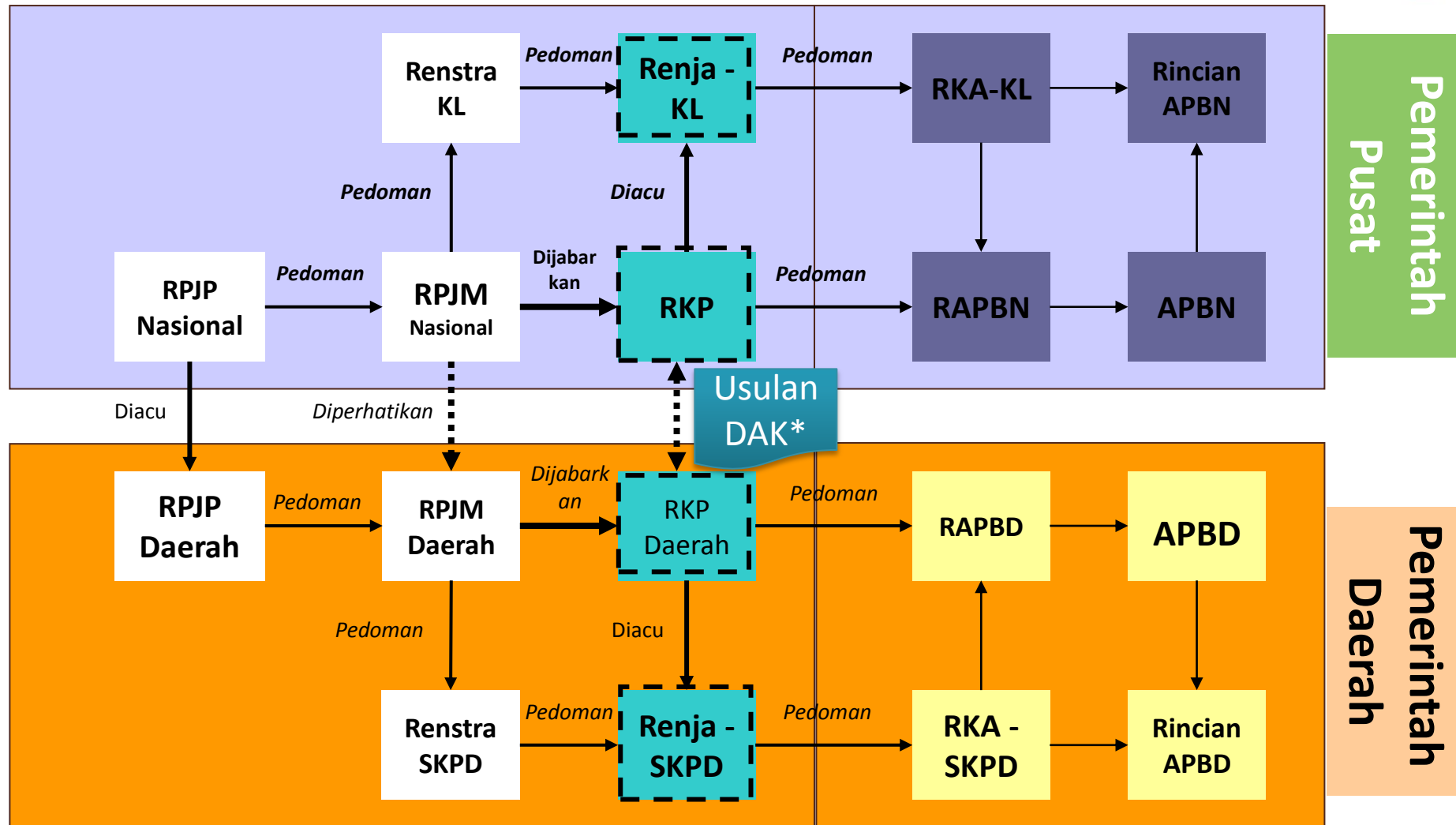
REFORMULASI KEBIJAKAN DTK: DANA ALOKASI KHUSUS



1. Memperbaiki ruang lingkup DAK hingga mencakup DAK Fisik dan DAK Non Fisik.
2. Meningkatkan anggaran DAK, termasuk dari pengalihan anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang sudah menjadi kewenangan daerah ke DAK.
3. Mempertajam fokus DAK Fisik untuk mendanai bidang/sub bidang infrastruktur publik dan sarana/prasarana pelayanan dasar berdasarkan prioritas nasional dan kewilayahan (daerah perbatasan, tertinggal, dan kepulauan).
4. Melakukan revolusi sistem pengalokasian DAK dari semula bersifat *top down* menjadi *bottom up* untuk mengakomodasi kebutuhan daerah guna memenuhi pencapaian standar pelayanan nasional.
5. Tidak ada kewajiban menyediakan dana pendamping DAK.



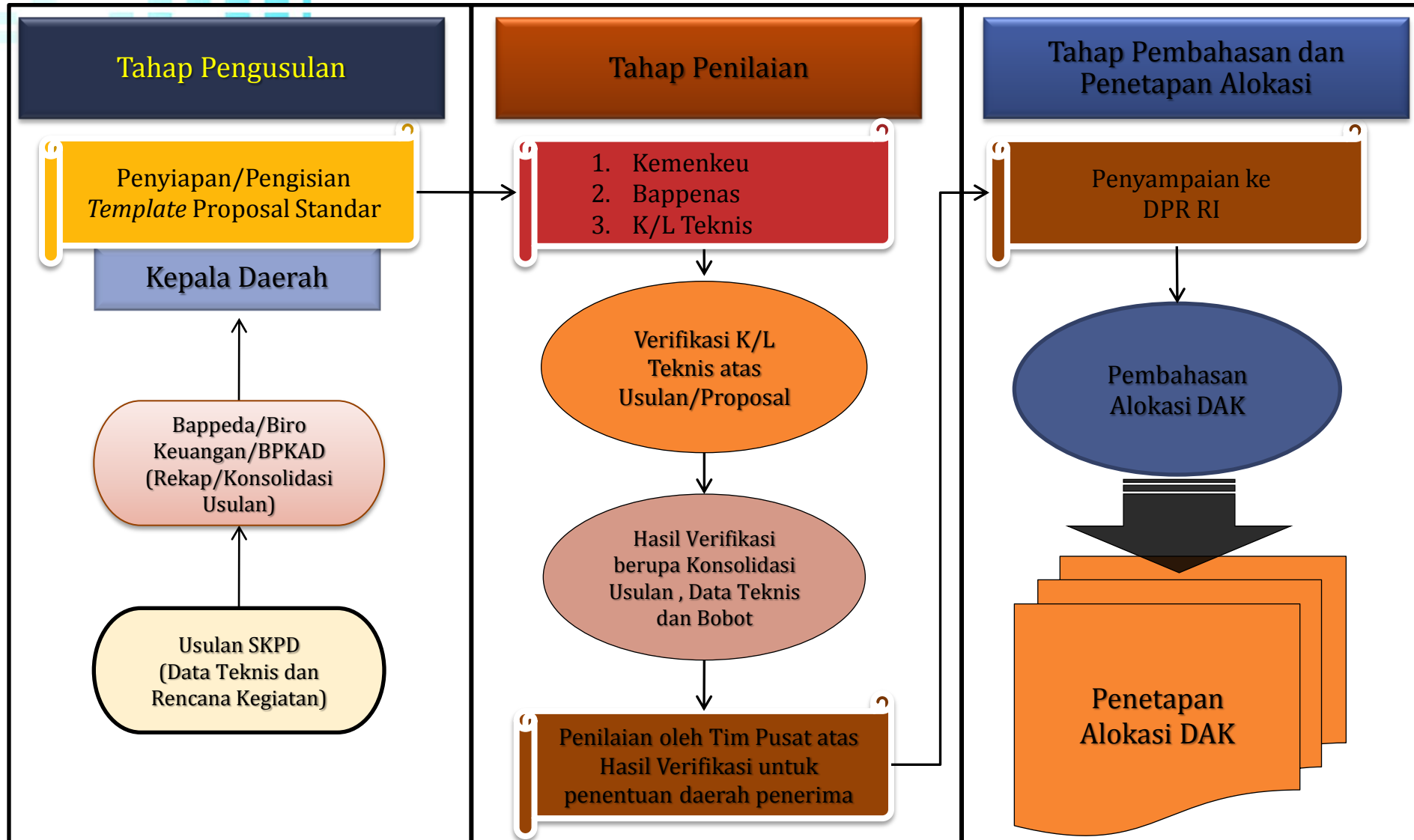
USULAN DAK DALAM KONTEKS SINERGITAS PERENCANAAN PUSAT DAN DAERAH



*Usulan DAK (*Proposal Based*) sesuai RKPD dan diselaraskan dengan RKP Nasional



Mekanisme Pengalokasian DAK Fisik Berdasarkan *Bottom Up System*

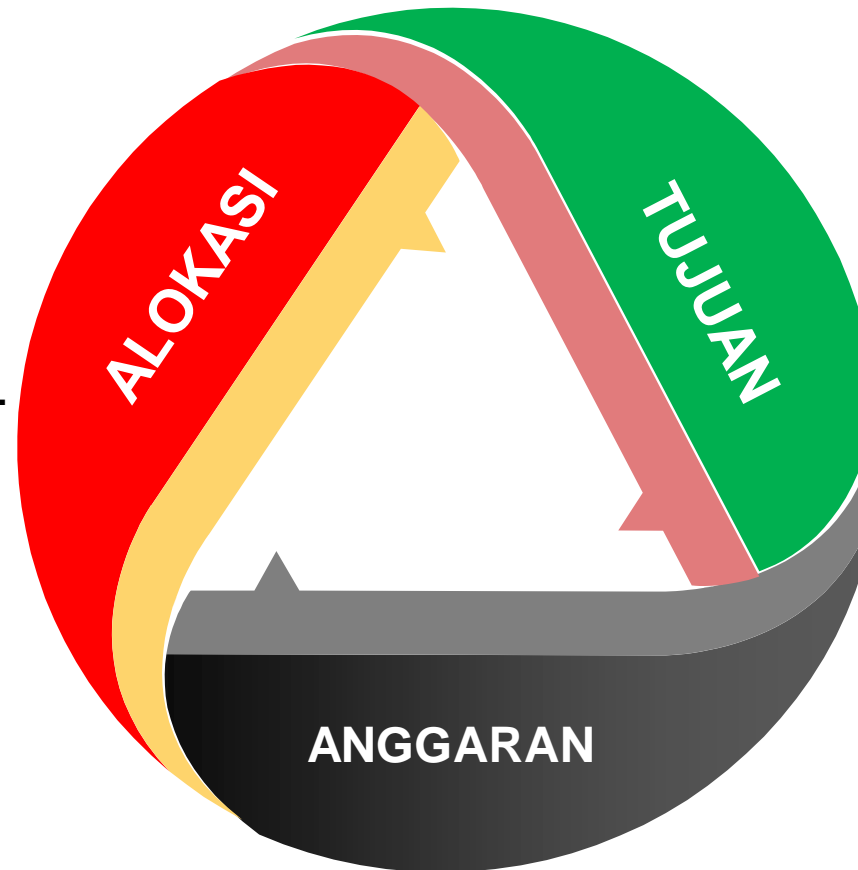




REFORMULASI DANA INSENTIF DAERAH



Dialokasikan kepada Provinsi, Kabupaten, dan Kota berdasarkan *kriteria utama* dan *kriteria kinerja*.



Tujuan:
Memberikan penghargaan (*reward*) kepada daerah yang mempunyai kinerja baik dalam:

- Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan daerah (*termasuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*)
- Pelayanan Dasar Publik
- Perekonomian dan kesejahteraan (*termasuk pengendalian tingkat inflasi*).

Anggaran :

- Pagu *diperbesar* agar besaran alokasi yang diterima masing-masing daerah *lebih signifikan* sebagai instrumen fiskal untuk menstimulasi peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan kesehatan fiskal daerah, kinerja pelayanan dasar, dan kinerja ekonomi serta kesejahteraan daerah.
- Penggunaan *tidak terikat* pada fungsi pendidikan.



Kriteria Kinerja dan Perhitungan Alokasi DID

No	Kriteria Ke Depan (New)	Bobot/ Skor
Kinerja Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah		50%
1.	Realisasi Pendapatan Asli Daerah/Realisasi Total Pendapatan Daerah	1 - 4
2.	Realisasi Pendapatan APBD/Target Pendapatan APBD	1 - 4
3.	(Realisasi Total Pendapatan Daerah + Realisasi Penerimaan Pembiayaan)/(Realisasi Total Belanja + Realisasi Total Pengeluaran Pembiayaan)	1 - 4
4.	Growth (Realisasi PDRD/Realisasi Total Pendapatan Daerah)	1 - 4
5.	Realisasi Pendapatan PDRD/Realisasi PDRB non migas	1 - 4
6.	Realisasi Belanja Modal/Realisasi Total Belanja APBD	1 - 4
7.	Realisasi Belanja Pegawai/Realisasi Total Belanja APBD	1 - 4
8.	Realisasi Belanja APBD/Pagu Belanja APBD	1 - 4
9.	Realisasi Ruang Fiskal/Realisasi Total Pendapatan APBD	1 - 4
10.	Defisit APBD/Total Pendapatan APBD	1 - 4
11.	Realisasi SILPA Tahun Sebelumnya/Realisasi Total Belanja APBD	1 - 4
Kinerja Pelayanan Dasar Publik		25%
1.	Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar	1 - 4
2.	Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Pertama	1 - 4
3.	Angka Melek Huruf	1 - 4
4.	Persentase bayi lima tahun yang mendapatkan imunisasi	1 - 4
5.	Persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan	1 - 4
6.	Persentase rumah tangga menurut sumber air minum layak	1 - 4
7.	Persentase rumah tangga menurut akses terhadap sanitasi layak	1 - 4
Kinerja Ekonomi dan Kesejahteraan		25%
1.	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	1 - 4
2.	Penurunan Tingkat Kemiskinan	1 - 4
3.	Penurunan Tingkat Pengangguran	1 - 4
4.	Pengendalian Tingkat Inflasi	1 - 4

Perhitungan Besaran Alokasi Daerah Yang Memenuhi Persyaratan Kriteria Utama dan Kriteria Kinerja



**Alokasi DID =
Alokasi Minimum
+
Alokasi Kinerja
(Passing Grade)**

Batas minimum nilai kinerja (*passing grade*) yang mendapat alokasi kinerja adalah daerah yang memiliki kategori nilai di atas atau sama dengan BB

1. Alokasi Minimum: Pemberian alokasi minimum terhadap daerah yang memiliki Opini WTP atas LKPD dan telah menetapkan Perda APBD tepat waktu.
2. Alokasi Kinerja: Berdasarkan peringkat nilai daerah, penetapan batas nilai sebagai passing grade penerima berdasarkan kelas atau tingkatan nilai daerah, yaitu:

Kategori Nilai (Grade)	Rentang (Interval)
AA+	$93,75 \leq \text{nilai kinerja} \leq 100$
AA	$87,50 \leq \text{nilai kinerja} < 93,75$
AA-	$81,25 \leq \text{nilai kinerja} < 87,50$
BB+	$75,00 \leq \text{nilai kinerja} < 81,25$
BB	$68,75 \leq \text{nilai kinerja} < 75,00$
BB-	$62,50 \leq \text{nilai kinerja} < 68,75$
CC+	$56,25 \leq \text{nilai kinerja} < 62,50$
CC	$50,00 \leq \text{nilai kinerja} < 56,25$
CC-	$43,75 \leq \text{nilai kinerja} < 50,00$
DD+	$37,50 \leq \text{nilai kinerja} < 43,75$
DD	$31,25 \leq \text{nilai kinerja} < 37,50$
DD-	$25 \leq \text{nilai kinerja} < 31,25$



DASAR KEBIJAKAN PENINGKATAN ANGGARAN DANA DESA



- Mempercepat perwujudan kesejahteraan umum masyarakat desa melalui peningkatan pelayanan publik desa dan peningkatan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional
- UU Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 72 ayat (2) dan Penjelasannya: Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (*on top*) secara bertahap.
- PP Nomor 22 Tahun 2015, pasal 30 A ayat (1): Pengalokasian anggaran Dana Desa dalam APBN dilakukan secara bertahap, yang dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Tahun Anggaran 2015 paling sedikit sebesar 3% (tiga per seratus) dari anggaran Transfer ke Daerah;
 - b. Tahun Anggaran 2016 paling sedikit sebesar 6% (enam per seratus) dari anggaran Transfer ke Daerah; dan
 - c. Tahun Anggaran 2017 dan seterusnya sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari anggaran Transfer ke Daerah.



Roadmap Dana Desa



Jumlah Desa
74.754

Dana Desa (DD):
Rp46.982,1 M
Rata-rata DD per Desa:
Rp**628,5** juta
ADD:
Rp36.723,9 M
Bagi Hasil PDRD:
Rp2.650,4 M
TOTAL= Rp86.356,4M
Rata2 perdesa:
Rp1.115,2 juta

Dana Desa (DD):
Rp103.791,1M
Rata-rata DD per Desa:
Rp **1.400,8** juta
ADD:
Rp55.939,8M
Bagi Hasil PDRD:
Rp3.055,3M
TOTAL= Rp162.786,3M
Rata2 perdesa:
Rp2.197,1 juta

APBN-P
2015

Dana Desa (DD):
Rp20.766,2 M
Rata-rata DD per Desa:
Rp **280,3** juta
ADD:
Rp32.666,4 M
Bagi Hasil PDRD:
Rp2.091,0 M
TOTAL= Rp55.523,6M
Rata2 perdesa:
Rp749,4 juta

2016

Dana Desa (DD):
Rp81.184,3M
Rata-rata DD per Desa:
Rp**1.095,7** juta
ADD:
Rp42.285,9M
Bagi Hasil PDRD:
Rp2.733,8M
TOTAL= Rp126.204,2M
Rata2 perdesa:
Rp1.703,3 juta

2017

2018

2019

Dana Desa (DD):
Rp111.840,2 M
Rata-rata DD per Desa:
Rp **1.509,5** juta
ADD:
Rp60.278,0 M
Bagi Hasil PDRD:
Rp3.376,7M
TOTAL= Rp175.494,9 M
Rata2 perdesa:
Rp2.368,6 juta

Keterangan:

1. Alokasi Transfer ke Daerah TA 2017-2019 berdasarkan *Medium-Term Budget Framework*
2. Dari 508 kab/kota, yang mempunyai Desa sebanyak 434 kab/kota.
3. Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 10% dari DAU dan DBH dan bagian hasil PDRD sebesar 10% dihitung berdasarkan jumlah kab/kota yang memiliki Desa.
4. Jumlah Desa pada tahun 2015 sebanyak 74.093 dan berdasarkan data dari Kemendagri (Permendagri No. 56/2015) naik sebanyak 661 desa sehingga pada tahun 2016 sebanyak 74.754 Desa, dan diasumsikan s.d. tahun 2019 tidak bertambah.

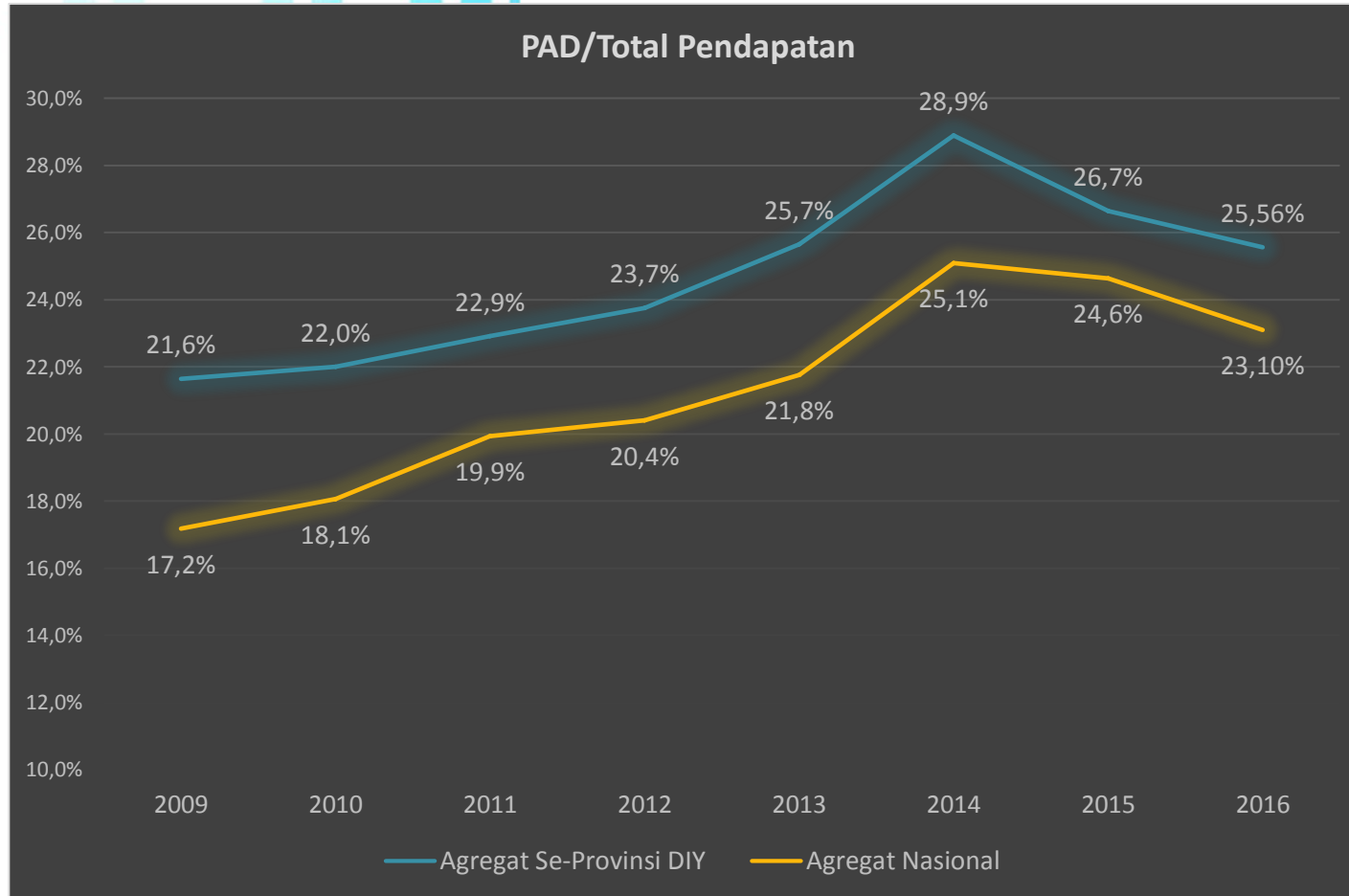




KONDISI PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI PROVINSI D.I. YOGYAKARTA



RASIO PAD TERHADAP TOTAL PENDAPATAN (2009-2016)

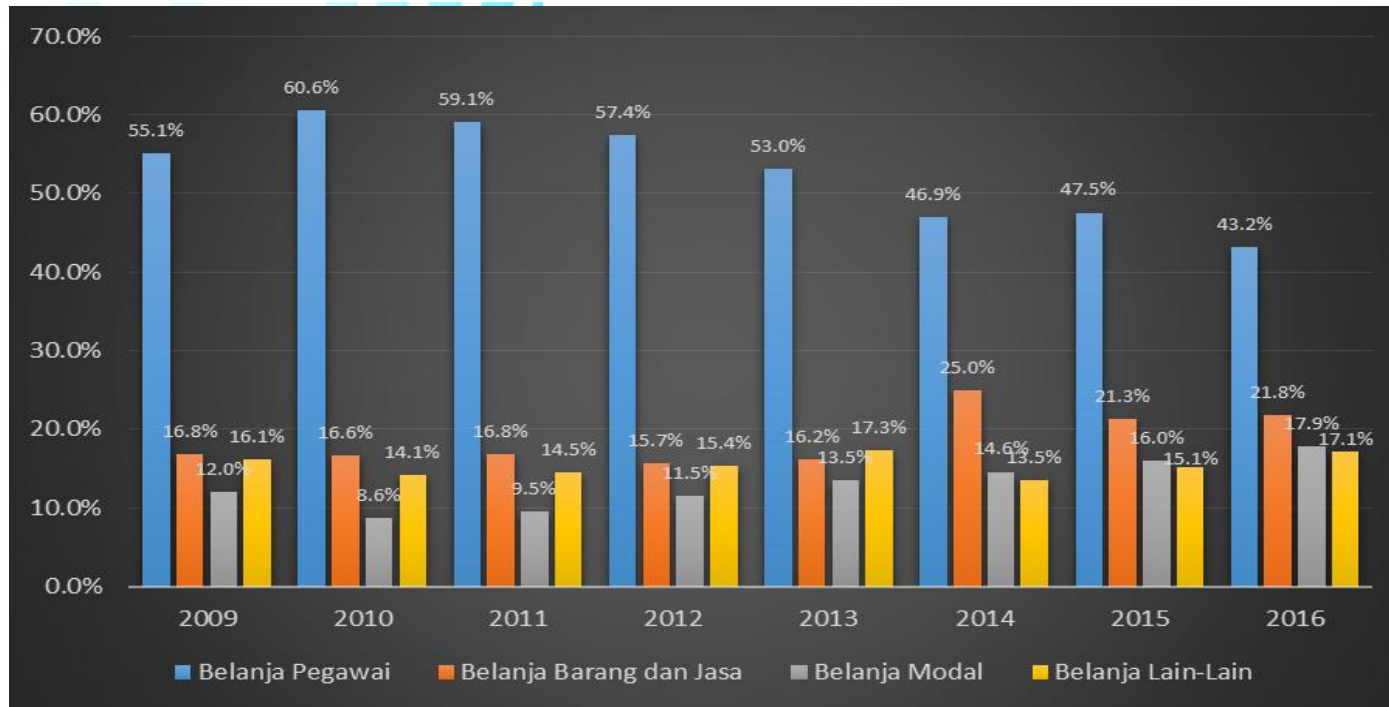


RASIO DARI TAHUN 2009 S.D 2014 **MENGALAMI PENINGKATAN**, NAMUN TERJADI PENURUNAN PADA TAHUN 2015 DAN 2016. SECARA UMUM RASIO PAD/TOTAL PENDAPATAN SE- PROV. DIY BERADA **DI ATAS** RASIO AGREGAT NASIONAL

Ket: Data 2015 & 2016 merupakan data alokasi



STRUKTUR BELANJA APBD PROVINSI/KAB/KOTA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MASIH KURANG OPTIMAL



- **Proporsi terbesar belanja daerah adalah belanja pegawai**, dengan proporsi diatas 40% namun kecenderungannya menurun.
- **Proporsi belanja modal relatif kecil**, meskipun mengalami peningkatan mulai tahun 2012-2016.

Jenis Belanja Daerah (dalam miliar rupiah)	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Belanja Pegawai	2,920.00	3,465.20	3,926.60	4,442.40	4,756.30	5,093.90	6,008.40	6,074.45
Belanja Barang dan Jasa	890.7	947.8	1,118.20	1,215.10	1,454.40	2,711.00	2,697.00	3,060.62
Belanja Modal	637.5	494.1	634.1	889.6	1,206.30	1,582.90	2,022.90	2,512.48
Belanja Lain-Lain	854.9	808.7	964.8	1,189.60	1,551.50	1,468.20	1,909.40	2,408.11
Total	5,303.10	5,715.80	6,643.70	7,736.70	8,968.50	10,856.00	12,637.70	14,055.66



PENETAPAN DAN PENYAMPAIAN APBD DAERAH SE-PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



Penetapan APBD DIY Tahun 2011-2016

	Desember	Januari	Februari
2011	5	1	
2012	6		
2013	5	1	
2014	5		1
2015	6		
2016	6		

Penyampaian APBD DIY Tahun 2011-2016

	Januari	Februari	Maret
2011	4	2	
2012	4	2	
2013	5	1	
2014	5		1
2015	6		
2016	6		

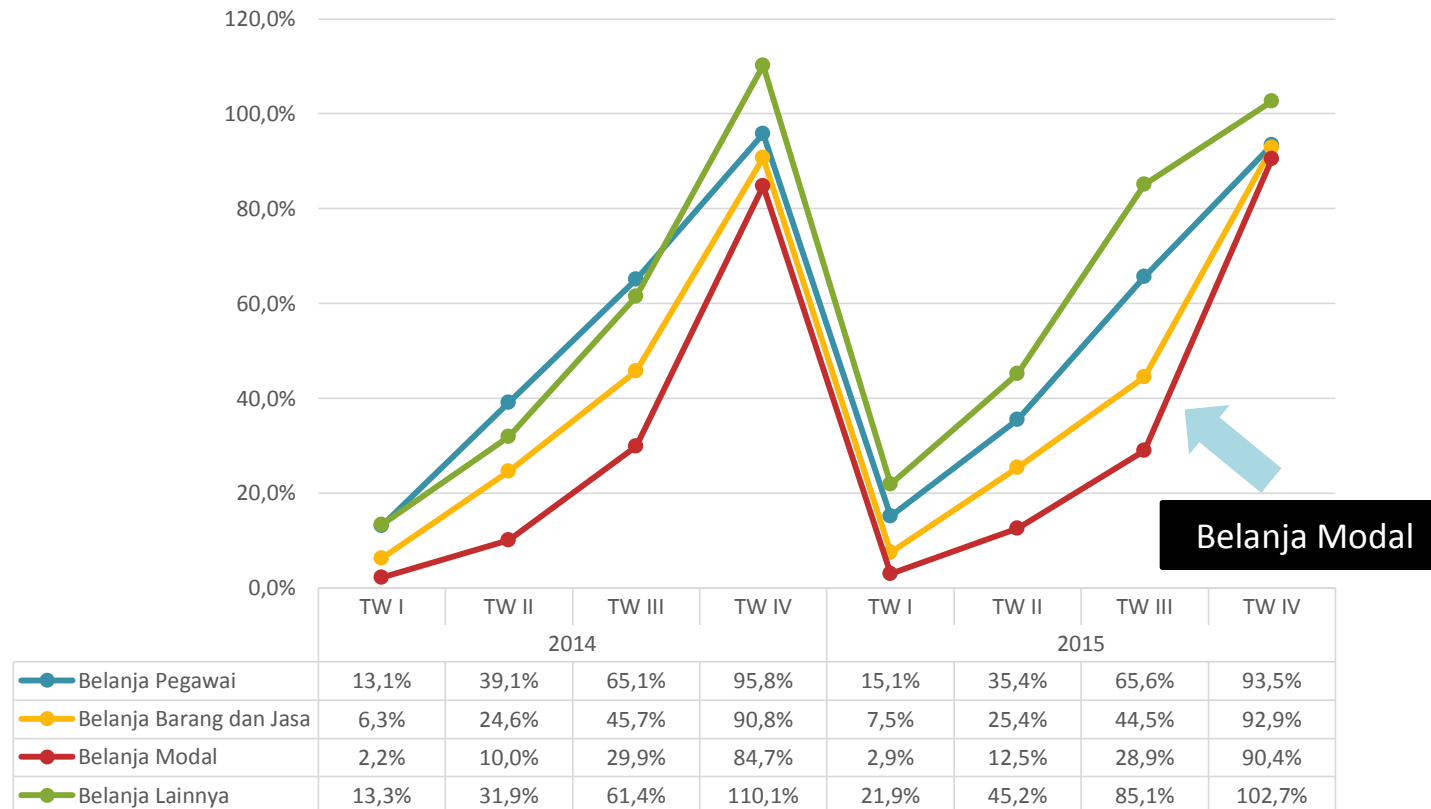
- Pada bulan Januari 2016, seluruh daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyampaikan APBDnya dan seluruhnya telah menetapkan APBD tepat waktu.



PENYERAPAN BELANJA APBD RELATIF LAMBAT



Persentase Realisasi Belanja Daerah Per Jenis Agregat Nasional Tahun 2014 dan Tahun 2015



- Penyerapan Belanja Modal di Triwulan I s/d III sangat rendah, namun melonjak tinggi di akhir November s/d Desember.
- Terjadi karena perencanaan belanja modal yang kurang baik dan proses lelang yang memakan waktu lama.

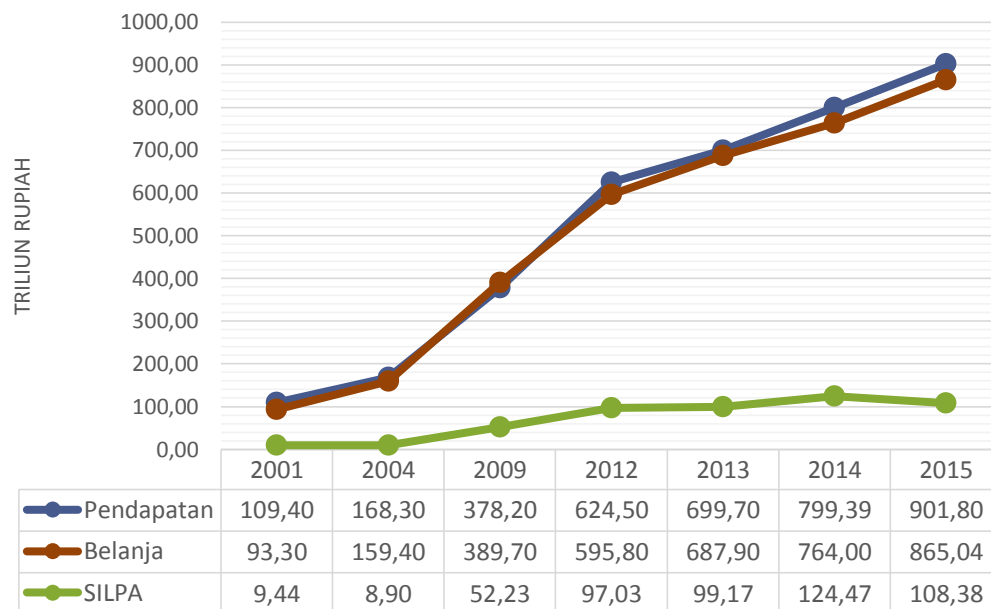
*TW IV Tahun 2015 angka perkiraan



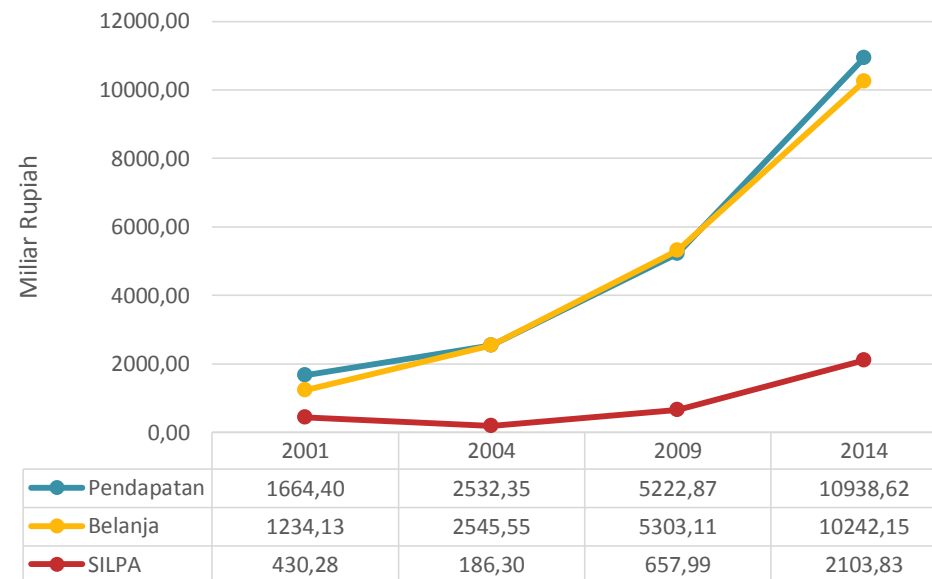
SILPA (SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN)



NASIONAL



SE-PROVINSI DIY



*Data tahun 2015 Hasil Estimasi

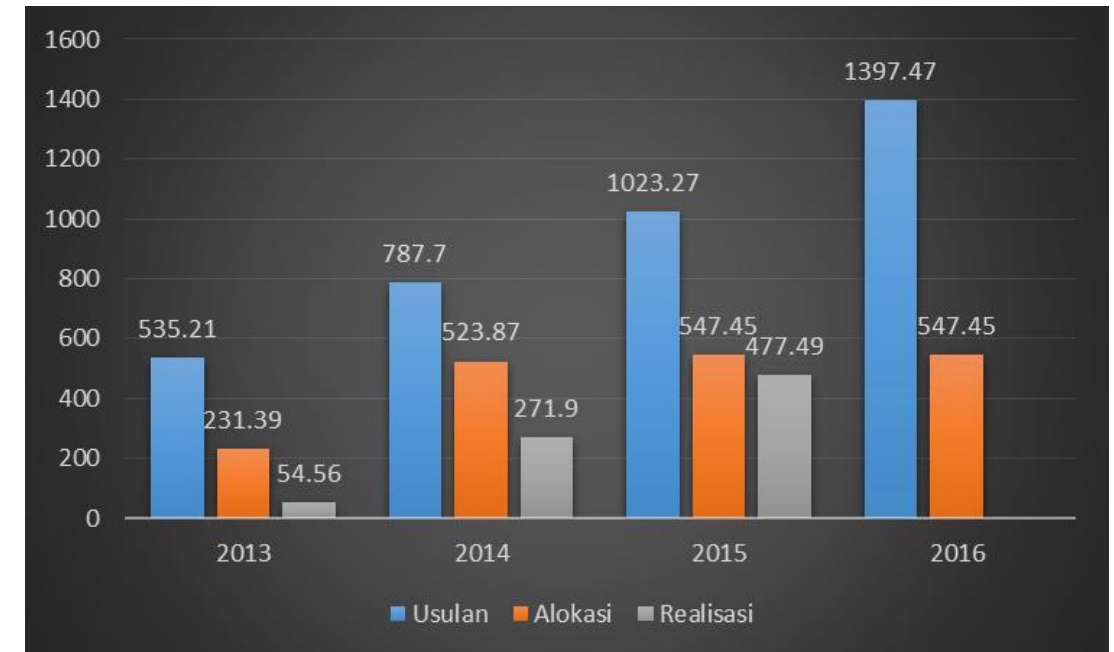
- **SILPA Nasional cenderung meningkat dari tahun ke tahun** dan bahkan diperkirakan hampir mencapai dua kali lipat, dari SILPA tahun 2009 sebesar Rp52,2 triliun menjadi Rp108.38 triliun* pada tahun 2015.
- **SILPA se-Provinsi DIY juga cenderung meningkat dari tahun ke tahun**, SILPA dari tahun 2009-2014 sebesar Rp. 657 Milyar menjadi Rp2,1triliun.
- Semakin besar SILPA tahun berkenaan memberikan indikasi **perencanaan anggaran dan pelaksanaan yang kurang baik** yang pada gilirannya berdampak terhadap kurang optimalnya pelayanan kepada masyarakat.



ALOKASI DAN PAGU ALOKASI DANA KEISTIMEWAAN DI YOGYAKARTA BELUM TERSERAP MAKSIMAL

No.	Bidang Kewenangan	Alokasi (miliar Rupiah)	
		2015	2016
1.	Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur & Wakil Gubernur	-	-
2.	Kebudayaan	420,8	179,1
3.	Pertanahan	10,6	13,9
4.	Kelembagaan pemerintah	1,7	1,8
5.	Tata ruang	114,4	352,7
Jumlah		547,5	547,5

ALOKASI DANA KEISTIMEWAAN DIY
TA. 2013 – 2015 (Miliar Rupiah)



Realisasi penyerapan Dana Keistimewaan DIY mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Pada tahun 2013 DK DIY hanya terserap 23,58% dari alokasi, namun penyerapan tersebut mengalami peningkatan menjadi 87,2% di tahun 2015.



TINGKAT AKUNTABILITAS DI PROVINSI DIY MEMBAIK



	2011	2012	2013	2014
WTP	-	1	2	2
WTP DPP	3	3	3	3
WDP	3	2	1	1

Opini BPK 2014 :

WTP : Provinsi D.I. Yogyakarta, Kab. Sleman

WTP DPP : Kota Yogyakarta, Kab. Bantul, Kab. Kulon Progo

WDP : Kab. Gunung Kidul

Akuntabilitas Provinsi D.I. Yogyakarta cenderung semakin baik. Hal ini dibuktikan dengan hasil opini BPK dimana jumlah Pemda dengan predikat WTP meningkat pada tahun 2014 jika dibandingkan dengan tahun 2011

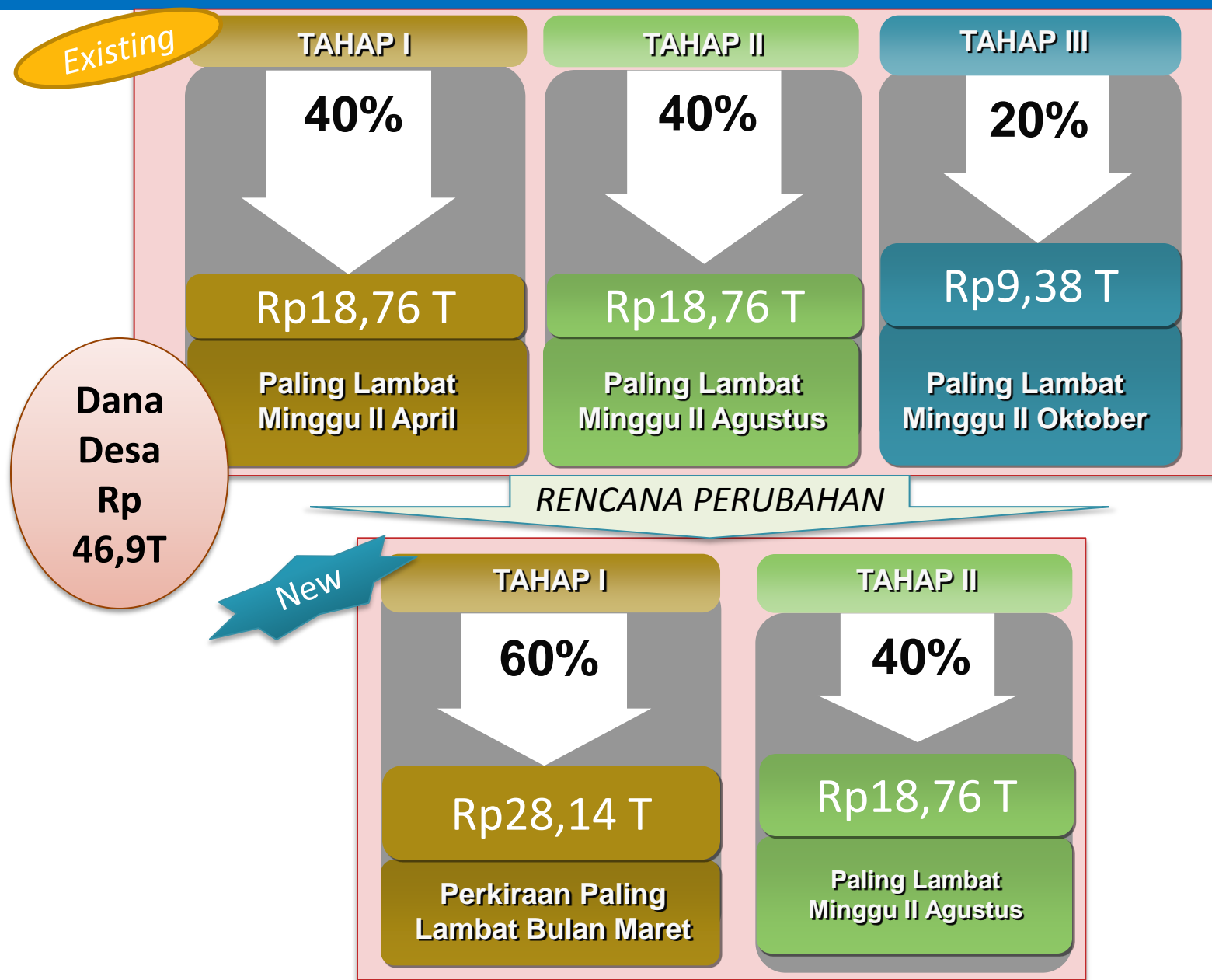


Terima Kasih





PENYALURAN DANA DESA TA 2016



- Melalui cara pemindah-bukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dari RKUD ke RKD
- Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD



MENGAPA PENYALURAN BERTAHAP

Mengurangi Dana

Idle

- DD diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
- Pada triwulan I proses pembangunan diperkirakan masih dalam proses perencanaan/persiapan
- Kebutuhan pembayaran terbesar (80%) diperkirakan pada bulan April-Agustus

Cash Management

- Penyaluran berdasarkan kebutuhan riil di desa agar DD tidak menjadi penambah dana idle di daerah
- Mengurangi beban Kas Negara, karena diawal tahun pemerintah juga harus mentransfer dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, sementara pada awal tahun penerimaan Negara belum optimal.

Prinsip Kehati-hatian

- Selain DD, Desa juga akan mengelola sumber-sumber pendapatan lain (ADD, BH PDRD dll).
- Disisi lain kapasitas SDM di Desa masih terbatas.
- Agar sumber pendanaan yang besar tersebut tdk kontraproduktif, perlu diberikan secara bertahap





APBD TA. 2016 Agregat Nasional (Dalam Milyar Rupiah)

URAIAN			ANGGARAN (miliar Rp)
I	Pendapatan		916,690.7
	1.	PAD	211,733.3
	2.	Dana Perimbangan	555,290.2
	3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	149,667.3
II	Belanja		970,244.5
	1.	Belanja Pegawai	361,058.8
	2.	Belanja Barang & Jasa	195,196.2
	3.	Belanja Modal	218,785.8
	4.	Belanja Lainnya	195,203.8
III	Surplus/Defisit		-53,553.8
IV	Pembiayaan Netto		54,273.8
	1.	Penerimaan Pembiayaan	71,051.7
	2.	Pengeluaran Pembiayaan	16,777.8

*Berdasarkan 476 Daerah Yang Telah Menyampaikan APBD



APBD TA. 2016 Se-Provinsi Yogyakarta (Dalam Milyar Rupiah)



URAIAN	Provinsi DI Yogyakarta	Kota Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Kab. Gunung Kidul	Kab. Sleman	Kab. Bantul	Se-Prov. Yogyakarta
Pendapatan	3,921.07	1,631.77	1,428.56	1,740.00	2,375.07	2,077.65	13,174.11
PAD	1,553.18	503.49	172.43	172.35	616.39	349.49	3,367.34
Dana Perimbangan	1,768.77	967.29	1,062.50	1,371.14	1,158.82	1,152.59	7,481.10
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	599.12	160.99	193.63	196.51	599.86	575.56	2,325.66
Belanja	4,189.99	1,888.63	1,477.68	1,758.14	2,517.55	2,223.66	14,055.65
Belanja Pegawai	783.11	961.54	783.81	1,027.51	1,344.96	1,173.52	6,074.45
Belanja Barang & Jasa	1,020.96	548.28	211.32	255.46	555.98	468.61	3,060.62
Belanja Modal	947.41	313.36	307.59	260.20	344.98	338.95	2,512.48
Belanja Lainnya	1,438.51	65.44	174.97	214.97	271.63	242.58	2,408.11
Surplus/Defisit	-268.92	-256.86	-49.12	-18.14	-142.48	-146.02	-881.54
Pembiayaan Netto	268.92	256.86	49.12	18.14	142.48	146.02	881.54
Penerimaan Pembiayaan	405.92	256.86	64.91	43.17	154.48	169.73	1,095.07
Pengeluaran Pembiayaan	137.00	0.00	15.79	25.03	12.00	23.71	213.53

Komposisi Terbesar Pendapatan

Komposisi Terbesar Belanja



TKDD TA. 2016 Se-Provinsi Yogyakarta (Dalam Milyar Rupiah)



URAIAN	Provinsi DI Yogyakarta	Kota Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Kab. Gunung Kidul	Kab. Sleman	Kab. Bantul	Se-Prov. Yogyakarta
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	2,370.92	1,006.20	1,159.29	1,501.90	1,519.39	1,575.95	9,133.65
I. TRANSFER KE DAERAH	2,370.92	1,006.20	1,098.77	1,398.33	1,456.38	1,515.35	8,845.95
A. Dana Perimbangan	1,782.76	965.78	1,059.54	1,398.33	1,451.38	1,476.03	8,133.82
1. Dana Transfer Umum	1,063.72	724.48	741.63	980.65	1,071.37	1,033.60	5,615.45
a. Dana Bagi Hasil	122.89	54.21	23.14	25.65	57.06	33.78	316.72
- Dana Bagi Hasil Pajak	122.83	53.11	21.82	24.55	55.97	32.69	310.98
- Dana Bagi Hasil SDA	0.06	1.09	1.32	1.10	1.09	1.09	5.74
b. Dana Alokasi Umum	940.84	670.28	718.49	955.00	1,014.31	999.81	5,298.73
2. Dana Transfer Khusus	719.03	241.29	317.91	417.68	380.01	442.44	2,518.37
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	153.34	67.82	96.93	125.29	77.54	119.44	640.36
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik*)	565.70	173.47	220.98	292.39	302.47	323.00	1,878.01
B. Dana Insentif Daerah	40.71	40.42	39.23	-	5.00	39.31	164.68
C. Dana Otsus & Dana Keistimewaan DIY	-	-	-	-	-	-	-
- Dana Otsus	-	-	-	-	-	-	-
- Dana Keistimewaan DIY	547.45	-	-	-	-	-	547.45
II. DANA DESA	-	-	60.51	103.57	63.01	60.60	287.70



Dana Transfer Khusus TA. 2016 Se-Provinsi Yogyakarta (Dalam Milyar Rupiah)



ALOKASI DAK FISIK TA 2016		Provinsi DI Yogyakarta	Kota Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Kab. Gunung Kidul	Kab. Sleman	Kab. Bantul	Se-Provinsi Yogyakarta
DAK REGULER		153.34	30.00	32.35	56.08	39.25	53.26	364.27
1	Pendidikan	0.00	0.00	1.36	3.97	1.57	1.46	8.37
2	Kesehatan dan KB	35.48	6.12	7.56	22.10	8.74	8.12	88.12
3	Perumahan, Air Minum dan Sanitasi	0.00	0.60	0.28	0.88	0.31	0.32	2.39
4	Kedaulatan Pangan	32.49	2.57	1.21	3.80	1.36	1.37	42.80
5	Energi Skala Kecil	72.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.45
6	Kelautan dan Perikanan	4.66	0.00	0.39	1.24	0.44	0.45	7.19
7	Prasarana Pemda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.34	0.55	0.56	1.75	0.63	0.63	5.45
9	Transportasi	6.92	0.16	0.26	0.81	0.29	0.08	8.51
10	Sarana dan Prasarana Perdagangan	0.00	0.00	0.73	1.53	0.92	0.83	4.01
11	Sarana dan Prasarana Penunjang	0.00	20.00	20.00	20.00	24.98	40.01	124.99
DAK INFRASTRUKTUR PUBLIK DAERAH		0.00	37.82	64.59	69.21	38.29	66.17	276.08
DAK AFFIRMASI		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAK FISIK		153.34	67.82	96.93	125.29	77.54	119.44	640.36
ALOKASI DAK NON FISIK TA 2016								
1.	Bantuan Operasional Sekolah	558.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558.41
2.	BOP PAUD	0.00	11.16	10.12	14.26	17.04	16.04	68.62
3.	Tunjangan Profesi Guru PNSD	0.00	156.13	197.36	261.31	268.18	291.24	1174.23
4.	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	0.00	0.00	1.15	2.02	2.21	0.75	6.13
5.	Bantuan Operasional Kesehatan dan BOKB	0.00	6.18	8.30	12.13	12.32	12.24	51.16
6.	Dana Peningkatan Pengelolaan Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan	7.29	0.00	4.05	2.68	2.73	2.73	19.47
TOTAL DAK NON FISIK		565.70	173.47	220.98	292.39	302.47	323.00	1878.01
TOTAL DANA TRANSFER KHUSUS		719.03	241.29	317.91	417.68	380.01	442.44	2518.37



Dana Desa TA. 2015-2016 Se-Provinsi Yogyakarta



NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	% terhadap TOTAL DESA	JUMLAH ANGGARAN	% terhadap TOTAL ANGGARAN
Provinsi Aceh	6,474	8.66%	3,829.75	8.15%
Provinsi Sumatera Utara	5,418	7.25%	3,293.28	7.01%
Provinsi Sumatera Barat	880	1.18%	598.64	1.27%
Provinsi Riau	1,592	2.13%	999.28	2.13%
Provinsi Jambi	1,399	1.87%	856.77	1.82%
Provinsi Sumatera Selatan	2,859	3.82%	1,780.77	3.79%
Provinsi Bengkulu	1,341	1.79%	813.90	1.73%
Provinsi Lampung	2,435	3.26%	1,536.76	3.27%
Provinsi Jawa Barat	5,319	7.12%	3,568.44	7.60%
Provinsi Jawa Tengah	7,809	10.45%	5,002.43	10.65%
Provinsi DI Yogyakarta	392	0.52%	287.70	0.61%
Provinsi Jawa Timur	7,724	10.33%	4,969.12	10.58%
Provinsi Kalimantan Barat	1,977	2.64%	1,241.61	2.64%
Provinsi Kalimantan Tengah	1,434	1.92%	904.37	1.92%
Provinsi Kalimantan Selatan	1,866	2.50%	1,125.24	2.40%
Provinsi Kalimantan Timur	836	1.12%	540.76	1.15%
Provinsi Sulawesi Utara	1,505	2.01%	911.50	1.94%
Provinsi Sulawesi Tengah	1,842	2.46%	1,124.64	2.39%
Provinsi Sulawesi Selatan	2,253	3.01%	1,425.60	3.03%
Provinsi Sulawesi Tenggara	1,846	2.47%	1,126.87	2.40%
Provinsi Bali	636	0.85%	416.26	0.89%
Provinsi Nusa Tenggara Barat	995	1.33%	677.49	1.44%
Provinsi Nusa Tenggara Timur	2,995	4.01%	1,849.35	3.94%
Provinsi Maluku	1,198	1.60%	754.64	1.61%
Provinsi Papua	5,419	7.25%	3,385.12	7.21%
Provinsi Maluku Utara	1,064	1.42%	653.46	1.39%
Provinsi Banten	1,238	1.66%	791.25	1.68%
Provinsi Bangka Belitung	309	0.41%	206.29	0.44%
Provinsi Gorontalo	657	0.88%	403.68	0.86%
Provinsi Kepulauan Riau	275	0.37%	177.77	0.38%
Provinsi Papua Barat	1,744	2.33%	1,074.69	2.29%
Provinsi Sulawesi Barat	576	0.77%	363.56	0.77%
Provinsi Kalimantan Utara	447	0.60%	291.10	0.62%
TOTAL	74,754	100.00%	46,982.08	100.00%

*Milyar Rupiah



Dana Desa TA. 2015-2016 Se-Provinsi Yogyakarta

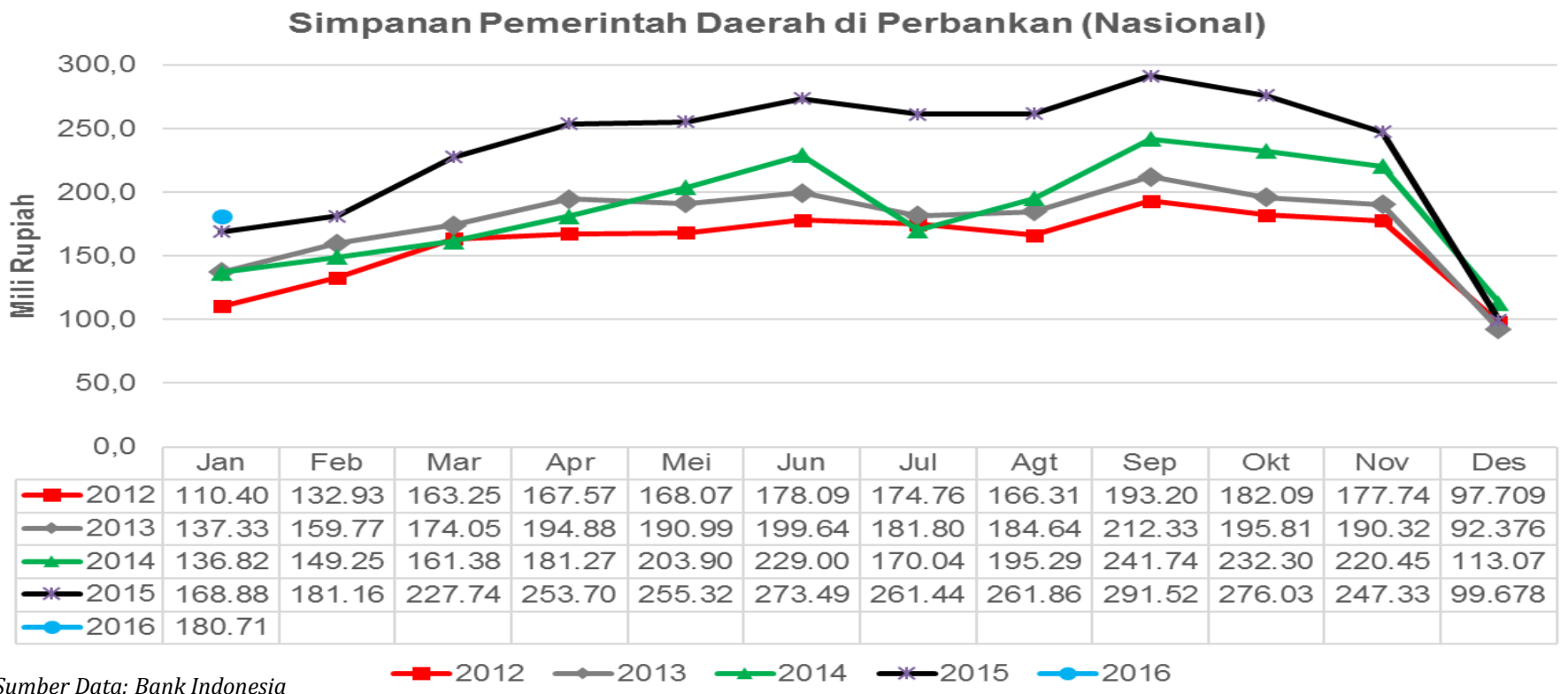


NO	NAMA DAERAH	2015		2016		PERUBAHAN	
		JUMLAH DESA	ANGGARAN*	JUMLAH DESA	ANGGARAN*	JUMLAH DESA	ANGGARAN*
	Total Provinsi DI Yogyakarta	392	128.08	392	287.70	0	159.62
1	Kab. Bantul	75	26.96	75	60.60	0	33.64
2	Kab. Gunung Kidul	144	46.12	144	103.57	0	57.45
3	Kab. Kulon Progo	87	26.95	87	60.51	0	33.56
4	Kab. Sleman	86	28.05	86	63.01	0	34.97

*Milyar Rupiah



DANA PEMERINTAH DAERAH DI PERBANKAN TAHUN 2012 - 2016



2012 2013 2014 2015 2016

1. Sesuai tren perkembangan jumlah simpanan pemda di perbankan pada empat tahun terakhir, posisi simpanan pemda di perbankan pada bulan September merupakan jumlah tertinggi pada setiap tahunnya. Pada bulan Oktober-Desember, simpanan pemda di perbankan menurun dan berada pada posisi terendah di bulan Desember.
2. Simpanan pemda di perbankan pada bulan Januari 2016 mencapai Rp180,71 Triliun, mengalami kenaikan signifikan sebesar 81,3% dari bulan sebelumnya yakni Desember 2015 yang sebesar Rp99,68 triliun. Kenaikan ini diduga disebabkan oleh perubahan kebijakan transfer ke daerah (penyaluran DBH Triwulan I yang lebih awal), penyaluran DAU sebanyak 2x di bulan Januari 2016 (DAU untuk bulan Januari dan Februari 2016), serta realisasi belanja daerah yang relatif rendah di awal Triwulan I.

Ket: Posisi simpanan pemerintah daerah adalah posisi dana pemda di perbankan yang tercatat berdasarkan lokasi dimana bank berkedudukan.